**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Penegasan Judul**

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, penulis akan mengurai istilah dalam skripsi ini agar pembaca tidak mengalami kesulitan ketika membaca skripsi ini, judul dari suatu karya ilmiah merupakan inti atau materi dari suatu masalah yang akan dibahas dikaji dan diuraikan secara sistematis, dalam hal ini penulis memilih dan menetapkan judul, yaitu: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2011-2016)’’** untuk mempermudah memahami maksud skripsi ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini:

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang[[1]](#footnote-2)
2. **Pendapatan Asli Daerah** adalahpenerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[[2]](#footnote-3)
3. **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.[[3]](#footnote-4)
4. **Kemiskinan**, adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri**.[[4]](#footnote-5)**
5. **Belanja Modal,** menurut standar akutansi pemerintah (SAP) pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untukbiaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset[[5]](#footnote-6)
6. **Persepektif** adalah sudut pandang[[6]](#footnote-7)
7. **Ekonomi Islam** adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa yang diteliti adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan firman allah dan sunnah rasul serta ijtihad para ulama tentang ekonomi.Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, kemiskinan dan Belanja Modal pemerintah. Penulis membahas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah

**B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan kemiskinan terhadap belanja Modal pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Secara objektif

Sebagaimana telah diketahui pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah itu sendiri. pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembiayaan daerah. Setiap daerah mempunyai kemampuan dalam mendanai kegiatan operasionalnya didaerahnya masing-masing hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah, untuk mengantisipasinya pemerintah menatrasfer dana perimbangan salah satunya yaitu DAU (dana alokasi umum). Yang ditujukan kepada setiap daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk pelayanan yang lebih baik kepada publik, dana hasil dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berkontribusi dalam mendanai belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah yang merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menambah aset modal yang kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika alokasi modal stabil maka kebutuhan fasilitas publik akan terpenuhi. Tetapi ketika pendapatan pemerintah porsinya lebih besar digunakan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal yang fungsinya untuk pembiayaan aset tetap maka belanja modal tidak akan berfungsi secara signifikan. Dengan demikian kebutuhan pokok masyarakat akan sulit untuk di penuhi dikarenakan sarana yang kurang memadai kemudian dengan begitu maka akan menambah tingkat kemiskinan didalam masyarakat, Sehingga menurut penulis perlu diadakan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan kemiskinan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Pringsewu.

1. Secara Subjektif

Pokok bahasan dalam proposal ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Ekonomi Syariah padaFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang merupakan satu kajian yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Dan untuk literatur penulisan tersedia di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, selain buku penulis juga menggunakan literatur lain seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan.

**C. Latar Belakang Masalah**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia.Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparasi dan akuntabilitas.Kedua aspek ini menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan Negara maupun daerah.Pembiayaan penyelenggara pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas bebas APBD. Dalam rangka penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dana perimbangan (DBH,DAU dan DAK) tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain di kelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. [[8]](#footnote-9)

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata pada pemerintah daerah secara proposional.Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat daan pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil.Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan.[[9]](#footnote-10)Era otonomi daerah mengharuskan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daerah nya dengan baik sehingga dapat menjadi sumber penerimaan daerah.

Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.[[10]](#footnote-11)

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemadirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekat yang kuat untuk membangun daerahnya dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar.[[11]](#footnote-12)Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[[12]](#footnote-13)Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini di sebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah termasuk pada kabupaten pringsewu agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.[[13]](#footnote-14) Pendapatan dari pajak yang terus meningkat akan menambah pendapatan asli daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.Pemerintah menyediakan Dana Alokasi Umum untuk membantu perekonomian daerah, Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggara pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayananan dasar kepada masyarakat, penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberi otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.[[14]](#footnote-15)

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagi hasilkan kepada daerah. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten /kota dapat ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU.[[15]](#footnote-16)

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan di satu daerah. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah pada Kabupaten Pringsewu.

Menurut Peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keungan daerah ketentuan pasal 52, belanja modal adalah belanja barang atau jasa yang di anggarkan pada pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaan yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.[[16]](#footnote-17) Peningkatan alokasi belanja modal dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas, saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk melakukan aktifitas pembangunan.[[17]](#footnote-18)

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**

**Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun**  | **Pendapatan Asli Daerah** | **Belanja Modal**  |
| 2011 | 19.347.217,00 | 105.833.817,00 |
| 2012 | 29.090.633,00 | 193.566259,00 |
| 2013 | 30.421.122,00 | 165.790.708,00 |
| 2014 | 63.339.740.42 | 129.650.441,55 |
| 2015 | 61.765.136,00 | 232.350.915,00 |
| 2016 | 68.157.777,00 | 58.065.709.006 |

 *Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal diatas dapat diketahui bahwapendapatan asli daerah dari tahun ketahunnya masih lebih rendah dibandingkan belanja modal dapat diketahui pada tahun 2011 PAD berjumlah 19.347.21 dibandingkan belanja modal yang mencapai 105.833.817. namun pendapatan asli daerah dikabupaten pringsewu dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Untuk pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar 63.339.740.42(dalam milyar rupiah) sedangkan tahun 2013 sebesar 30.421.122 terjadi peningkatan yang dari tahun 2012 tetapi tidak disertai dengan peningkatan belanja modal yang di anggarkan, yaitu sebesar165.790.708,00 Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten pringsewu perlu memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal**

**Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun**  | **Dana Alokasi Umum** | **Belanja Modal**  |
| 2011 | 368.176.154,00 | 105.833.817,00 |
| 2012 | 443.529.040,00 | 193.566259,00 |
| 2013 | 499.454.898,00 | 165.790.708,00 |
| 2014 | 547.622.366,00 | 129.650.441,55 |
| 2015 | 570.582.781,00 | 232.350.915,00 |
| 2016 | 633.088.784,00 | 58.065.709.006 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum dan belanja modal tahun 2011-2016 terdapat fenomena yang mana terjadi peningkatan dana alokasi umum tetapi tidak diikuti oleh belanja modal, dapat dilihat pada tahun 2011 pendapatan dari dana alokasi umum sebesar 368.176.154,00(dalam milyar rupiah) dialokasikan untuk belanja modal sebesar 105.833.817 (dalam milyar rupiah) ini masih sangat rendah dalam pengalokasiannya dibandingkan pendapatan yang di peroleh dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya.Dengan meningkatnya dana alokasi umum tersebut seharusnya dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah, pemerintah kabupaten pringsewu perlu memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan pemerintah maupun fasilitas publik, oleh karena itu pemerintah seharusnya mengubah komposisi belanja daerah dimana selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja operasional yang kurang produktif dari pada belanja modal. Perbedaan Pendapatan Asli daerah dengan Dana Alokasi Umum adalah PAD merupakan dana yang diperoleh dari kekayaan asli daerah yang di gunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, sedangkan DAU adalah dana yang diperoleh dari transfer pemerintah yang digunakan untuk pemerataan kemapuan daerah. dapat dilihat data rata-rata realisasi APBD kabupaten pringsewu pada tahun 2011-2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal**

**Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun**  | **Belanja daerah** | **Belanja Operasi** | **Belanja Modal** |
| 2011 | 388.388.452.667 | 330.299.993.671 | 105.833.817,00 |
| 2012 | 577.141.006 | 365.788.010 | 193.566259,00 |
| 2013 | 772.327.157947 | 455.433.128.333 | 165.790.708,00 |
| 2014 | 840.212.475 | 504.779.246 | 129.650.441,55 |
| 2015 | 1.002.293.230 | 564.018.874 | 232.350.915,00 |
| 2016 | 1.188.366.264 | 701.670.744 | 58.065.709.006 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan tabel 1.3 tentang perbandingan belanja operasi dan belanja modal diatas dapat dilihat bahwa nilai belanja modal terhadap total belanja daerah sangat rendah dibandingkan nilai belanja operasi terhadap total belanja daerah, pada tahun 2011 total belanja daerah yaitu sebesar 388.388.452.667 (dalam juta rupiah) yang digunakan untuk belanja modal sebesar 58.065.709.006 sangat rendah dari pada alokasi untuk belanja operasional sebesar 330.299.993.671 (dalam juta rupiah) dan pada tahun 2015 kenaikan yang signifikan terjadi pada total belanja daerah yaitu sebesar 1.002.293.230 (dalam milyar rupiah) yang digunakan untuk belanja modal sebesar 129. 650. 440 (dalam juta rupiah) juga masih sangat rendah dibandingkan untuk pembiayaan belanja operasional sebesar 564.018.874 (dalam milyar rupiah) apabila pendapatan daerah di gunakan kebanyakan untuk belanja operasi dibanding kan belanja modal maka akan terjadi kurang produktifnya dalam melakukan pelayanan publik.

Insfrastruktur dan sarana prasarana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana daerah ditunjang dengan modal yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitasnya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitas masyarakat tersebut.ketika produktifitas masyarakat sekitar meningkat kemungkinan besar akan banyak investor yang datang untuk menanamkan modal dan membuka usaha di daerah tersebut. Yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah.

Melihat fenomena yang terjadi sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur kepentingan dengan kepentingan golongan semata, keefer dan khamani. Halim dan Abdullah [[18]](#footnote-19) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah masyarakat.[[19]](#footnote-20) Misalnya yang sering terjadi adalah masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah, dimana pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, hal ini telah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya sendiri menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah di tuntut harus mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemeratan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga pada akhirnya kemiskinan bisa terentaskan dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Pada kabupaten pringsewu dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan masih cukup tinggi karena dapat dilihat setiap tahun mengalami kenaikan dengan kenaikan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014 ke 2015, hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan pringsewu pada tahun 2011-2016.

**Tabel 1.4**

**Data Kemiskinan Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2011-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun  | Angka kemiskinan  |
| 2011 | 11,62 |
| 2012 | 11.01 |
| 2013 | 9,81 |
| 2014 | 9,83 |
| 2015 | 11.80 |
| 2016 | 11,73 |

 Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di kabupaten pringsewu setiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 dengan jumlah 11,62 menurun sedikit menjadi 11,01 dengan penurunan yang masih dibilang sedikit pemerintah perlu meningkatkan pengalokasian belanja modal sehingga dapat lebih banyak menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten pringsewu. Menurut pasal UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa :”keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiens,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab,dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan,dan manfaat untuk masyarakat.[[20]](#footnote-21)

Salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata yaitu aspek pembiayaan.Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab antara aspek pendanaannya maka esensi otonomi menjadi kabur.[[21]](#footnote-22)Tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang aspek-aspek yang dapat merangsang perkembangan ekonomi.

Negara yang dijalankan dengan prinsip islami pada hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan.Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah.[[22]](#footnote-23) Negara harus mendistrbusikan pendapatan atau kekayaan Negara dengan secara adil dan merata kesemua kalangan masyarakat.

Allah Swt jelas-jelas memerintahkan supaya sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam Q.S Al-Hasr (59):7 berikut ini:

*Artinya:.......supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.......*

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras agama, dan karakternya untuk mendapatkan kecukupan bukan kekurangan.[[23]](#footnote-24)Masyarakat memerlukan adanya layanan dan tata kehidupan yang mampu membangkitkan aktivitas ekonomi, menambah semangat hidup, memberikan kemampuan untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bagi lingkungan masyarakatnya.[[24]](#footnote-25)

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimanakah skema belanja modal pemerintah dalam perspektif Ekonomi Islam?

**E. Batasan Masalah**

Dengan mempertimbangkan terbatasnya kemampuan pengetahuan, waktu dan biaya yang dimiliki serta data yang diperoleh, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya menyangkut masalah pendapatan daerah dana alokasi umum dan kemiskinan terhadap belanja modal pemerintahan

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2. Peneitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD DAU dan kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah
3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD DAU dan kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah dalam perspektif ekonomi islam
4. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
5. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten pringsewu dalam pengambilan keputusan
6. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah manajemen keuangan terutama di kabupaten pringsewu
1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 15.34 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) h. 106. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,2001) h. 261 [↑](#footnote-ref-4)
4. Nurul Huda,et al,*Ekonomi Pembangunan islam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015),h.23 [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://www.e-akutansi.com/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 16.20 WIB [↑](#footnote-ref-6)
6. http:/kbbi.web.id diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 19.35 WIB [↑](#footnote-ref-7)
7. Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* ,(Yogyakarta:CV BUDI UTAMA,2017)h.260. [↑](#footnote-ref-8)
8. Nur Indah Rahmawati,”Pengaruh Pendapatan ASli Daerah PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah, ”,(skripsi Program studi Ekonomii,Universitas Negeri Semarang, Semarang,2010),h.1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Indra Bastian, *Sistem Akutansi Sektor publik, edisi 2*, (Jakarta:Salemba Empat,2007),h.5 [↑](#footnote-ref-10)
10. Askam tuasikal, “Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia “Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008) h.143. [↑](#footnote-ref-11)
11. Raharjo Adisasmita*, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah,* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014),h.2. [↑](#footnote-ref-12)
12. Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2012), h. 52. [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul Halim,*Op.Cit*.h.161. [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Aries Djaenuri,*Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012),h.103. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.* h.104. [↑](#footnote-ref-16)
16. Rudy Badrudin, *Op.cit*, h.61. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rizanda Ratna Pradita,”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur”universitas Negeri Surabaya, h.2. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdullah Syukriy Dan Abdul Halim,”Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemerintah Dan Sumber Pendapatan”Jurnal Akutansi Pemerintah Vol 2, No.2,2006 [↑](#footnote-ref-19)
19. Arbie Gugus Wandira,”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengaloksian Belanja Modal”,(skripsi Program studi Akutansi,Universitas Negeri Semarang, Semarang,2013),h.2 [↑](#footnote-ref-20)
20. Achmad David Hermawan,”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokas Umum(DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal” Jurnal Riset Mahasiswa, Vol.xx, No.xx [↑](#footnote-ref-21)
21. Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, ( Jakarta: Erlangga, 2002) h. 171. [↑](#footnote-ref-22)
22. Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta:KENCANA, 2016),h.73. [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdullah Abdul Husain Attariqi*,Ekonomi Islam Prinsip,Dasar, Dan Tujuan*,(Yogyakarta:Magistra Insania Press,2004),h.303. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* h.66. [↑](#footnote-ref-25)